



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 80/KMA/SK/III/2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI  
CALON HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI,  
PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG RI  
TAHAP KEDUA**

- Membaca : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/KMA/SK/III/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahap kedua.
- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tahap kedua tahun 2010 dan terselenggaranya Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;  
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;  
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;  
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;  
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHAP KEDUA TAHUN 2010.**
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang terdiri dari Pokja :
- a. Pokja Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
  - b. Pokja Pendidikan dan Pelatihan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi.
  - c. Pokja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung RI ;
  - d. Pokja Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas melaksanakan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI, menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan, menyusun Peraturan Mahkamah Agung RI serta mempersiapkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di Ibu Kota Propinsi dan Pengadilan Tinggi secara bertahap ;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Pokja dibantu oleh Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II ;
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
- KELIMA** : Segala biaya yang berhubungan dengan Pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Mahkamah Agung RI ;

l

**KEENAM**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Maret 2010



**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.**

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Panitera Mahkamah Agung RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.  
 Nomor : 80/KMA/SK/III/2010 Tentang  
 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim  
 Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana  
 Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah  
 Agung Tahap Kedua.

**PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC  
 PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGADILAN TINGGI DAN  
 MAHKAMAH AGUNG RI TAHAP KEDUA**

**I. Pokja Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.**

**A. Penyusun Naskah Ujian, Memeriksa dan Menentukan Kelulusan.**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Djoko Sarwoko, SH. MH.	Ketua Muda Pidana Khusus	Ketua
2.	Suhadi, SH. MH.	Panitera Muda Pidana Khusus	Sekretaris
3.	Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.	Ketua Muda Pidana	Anggota
4.	H. M. Hatta Ali, SH. MH.	Ketua Muda Pengawasan	Ketua
5.	Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.	Hakim Agung	Anggota
6.	Moegihardjo, SH.	Hakim Agung	Anggota
7.	H. Muhammad Taufik, SH. MH.	Hakim Agung	Anggota
8.	Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH.	Akademisi	Anggota
9.	Dr. Bambang Widjayanto, SH. LLM.	Praktisi Hukum	Anggota
10.	Dr. Suharto, SH. MH.	Tokoh Masyarakat	Anggota
11.	Lukman Bahmid, SH	Tokoh Masyarakat	Anggota

**Tugas :**

1. Membuat/Menyusun soal-soal ujian tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
2. Memeriksa/mengkoreksi jawaban hasil ujian tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Melaksanakan tes wawancara/tes lisan bagi Peserta yang telah lulus ujian tertulis.
4. Menentukan kelulusan Peserta Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

**B. Penyelenggara dan Pengawas Ujian Tertulis.**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Moegihardjo, SH.	Hakim Agung	Ketua
2.	Lilik Srihartati, SH., MH.	Sekretaris Badan Pengawasan	Sekretaris
3.	HR. Anton Suyatno, SH. MH.	Sekretaris Kepaniteraan	Anggota
4.	Zarof Ricar, SH. S.Sos. M.Hum.	Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana	Anggota

*d*

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
5.	Suhadi, SH. MH.	Panitera Muda Pidana Khusus	Anggota
6.	H. Machmud Rahimi, SH. MH.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	Nurhadi, SH. MH.	Kepala Biro Hukum dan Humas	Anggota
8.	Drs. H. Aco Nur, MH.	Kepala Biro Kepegawaian	Anggota
9.	Dermawan S Djarnian, SH. MH. CN.	Kepala Biro Keuangan	Anggota

**Tugas :**

1. Membawa soal ujian tertulis dan kelengkapannya ke Daerah (Pengadilan Tinggi yang bersangkutan).
2. Menyelenggarakan dan mengawasi ujian tertulis di Pengadilan Tinggi.
3. Membawa kembali soal ujian dan lembar jawaban untuk diserahkan pada pemeriksa ujian di Mahkamah Agung RI.

**II. Pokja Pendidikan dan Pelatihan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi.**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.	Ketua Muda Pidana	Ketua
2.	I.G. Agung Sumanantha, Sh. MH.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.	Hakim Agung	Anggota
4.	Moegihardjo, SH.	Hakim Agung	Anggota
5.	H. Muhammad Taufik, SH. MH.	Hakim Agung	Anggota
6.	H. Anwar Usman, SH. MH.	Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil	Anggota
7.	Dr. Supandi, SH. M.Hum	Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Teknis Peradilan	Anggota
8.	Nurhadi, SH. MH.	Kepala Biro Hukum dan Humas	Anggota

**Tugas :**

1. Menyusun Kurikulum Pendidikan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
2. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

**III. Pokja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung RI.**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	H. M. Hatta Ali, SH. MH.	Ketua Muda Pengawasan	Ketua
2.	H. Machmud Rahimi, SH. MH.	Panitera Muda Pidana	Sekretaris
3.	H. Muhammad Taufik, SH. MH.	Hakim Agung	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
4.	H. Subagyo, SH., MM.	Kepala Badan Urusan Administrasi	Anggota
5.	H. Cicut Sutiarmo, SH. M.Hum.	Dirjen Badilum	Anggota
6.	Dr. H. M. Syarifuddin, SH. MH.	Kepala Badan Pengawasan	Anggota
7.	H. Anwar Usman, SH. MH.	Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil	Anggota
8.	Suhadi, SH. MH.	Panitera Muda Pidana Khusus	Anggota
9.	Nurhadi, SH. MH.	Kepala Biro Hukum dan Humas	Anggota

**Tugas :**

1. Merancang Peraturan Mahkamah Agung RI sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
2. Merancang Peraturan-peraturan lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

**IV. Pokja Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.	Ketua Muda Pembinaan	Ketua
2.	Lilik Srihartati, SH., MH.	Sekretaris Badan Pengawasan	Sekretaris
3.	Moegihardjo, SH.	Hakim Agung	Anggota
4.	Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.	Hakim Agung	Anggota
5.	Drs. H. M. Rum Nessa, SH. MH.	Sekretaris Mahkamah Agung RI	Anggota
6.	Drs. Hariri YS. SH. MM. MH.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
7.	Dermawan S Djarnian, SH. MH. CN.	Kepala Biro Keuangan	Anggota
8.	Drs. H. Aco Nur, MH.	Kepala Biro Kepegawaian	Anggota
9.	Siti Nurjanah, SH. MH.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Anggota
10.	Ardaning Sandrawati, SH., M.Pd.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

**Tugas :**

1. Mempersiapkan Tata Naskah Usulan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari Ketua Mahkamah Agung RI kepada Presiden RI.
2. Mempersiapkan Tata Naskah pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Mempersiapkan peresmian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.



**J. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.**

Lampiran II : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.  
Nomor : 80/KMA/SK/III/2010 Tentang  
Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim  
Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah  
Agung Tahap Kedua.

**PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC  
PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGADILAN TINGGI DAN  
MAHKAMAH AGUNG RI TAHAP KEDUA**

**Sekretariat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi.**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Lilik Srihartati, SH., MH.	Sekretaris Badan Pengawasan	Koordinator
2.	M.E.R. Herki Artani Richmiani, SH.	Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi	Sekretaris
3.	R. Parto Hutomo D. SH. MM.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan	Anggota
4.	Sri Kamala Dewi, SH	Kepala Bagian Kepegawaian Badan Pengawasan	Anggota
5.	Ramdani Dudung, SH	Kepala Bagian Urusan Dalam	Anggota
6.	Siti Kholisoh, SH.	Kasubdit Kasasi Pidana Khusus	Anggota
7.	Sofyan, SH.	Kepala Bagian PNBP	Anggota
8.	Herry Lasmono, SH. MH.	Kepala Bagian Umum Kepaniteraan	Anggota
9.	Eko Nugroho, SH.	Koordinator Pidana Khusus Kasasi	Anggota
10.	Ogan Sudradjat, SH.	Koordinator Pidana Khusus PK dan Grasi	Anggota
11.	Khosidah, SH.	Staf Panitera Muda Pidana Khusus	Anggota
11.	Kartika Sandi Taurus, A.Md.	Staf Biro Hukum dan Humas	Anggota
12.	Dwi Listiani, A.Md.	Staf Biro Hukum dan Humas	Anggota
13.	Prayoga Nurjaya, S.Kom.	Staf Panitera Muda Pidana Khusus	Anggota

**Tugas :**

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pokja dalam rangka terselenggaranya Seleksi Calon Hakim Ad Hoc dan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

  
**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**  
  
**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.**